

BAB V

KESIMPULAN

Pada tahun 1910 Korea merupakan negara yang berada dibawah Kekaisaran Jepang. Hingga akhirnya Jepang mengalami kekalahan akibat Amerika Serikat melakukan pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Keadaan tersebut membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet datang untuk menduduki negara Korea. Pada tahun 1945, kedua negara sepakat untuk membagi wilayah sepanjang *the 38th Parallel*. Dimana Amerika Serikat menduduki wilayah Korea bagian Selatan dan Uni Soviet menduduki wilayah bagian Utara.

Pada tahun 1950, Korea Utara mulai menginvasi Korea Selatan yang tentu didukung oleh pihak Uni Soviet dengan datang di wilayah perbatasan *the 38th Parallel* dan terjadilah pertempuran dengan Korea Selatan. Pada saat itu Korea Utara juga dibantu oleh pihak Tiongkok. Hal ini sebagai tanda awal terjadinya perang antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Hingga tahun 2018, Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih dalam kondisi perang. Bahkan hubungan kedua negara belum menemui titik terang hingga kepemimpinan Park Geun Hye. Seperti rahasia umum, Korea Utara merupakan negara yang masif dalam melakukan uji coba nuklir. Pada saat era Park Geun Hye, Korea Utara justru semakin masif dalam melakukan uji coba nuklirnya. Hal ini dikarenakan sikap Park yang menggunakan cara-cara agresi dalam hubungannya dengan Korea Utara. Saat itu Park mengambil kebijakan untuk memutus hampir seluruh kontak dengan Korea Utara. Dan Park juga memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara. Selain itu, untuk melindungi stabilitas keamanan negaranya, di era Park Geun Hye juga telah mengadakan latihan militer dengan Amerika Serikat dan Park menyetujui adanya program sistem anti rudal THAAD atau *Terminal High Altitude Area Defense*. Tentu hal ini

menyulut kemarahan Korea Utara sehingga membuat Utara semakin masif dalam melakukan uji coba nuklir.

Sedangkan pada saat kampanye pemilihan Presiden baru di Korea Selatan, Moon Jae In berjanji akan meningkatkan kontak dengan Korea Utara. Hingga terpilihnya Moon Jae In sebagai Presiden baru Korea Selatan pada tanggal 10 Mei 2017 menandai adanya babak baru dalam pengambalian kebijakan terkait dengan hubungan Korea Utara. Dimana Moon mengambil kebijakan yang dinamakan *Sunshine Policy*. Kebijakan ini dibentuk pada era Kim Dae Jung dan digunakan kembali oleh Roh Moon-hyun. *Sunshine Policy* merupakan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara yang lebih menekankan pada kerjasama damai, serta menuju rekonsiliasi sebagai awal untuk mengarah ke reunifikasi atau penyatuan Korea kembali.

Dalam kepemimpinan era Moon Jae In, Korea Selatan mengambil kebijakan yang lebih terbuka terhadap Korea Utara. Sikap lebih terbuka disini berarti, Presiden Moon Jae In ingin lebih meningkatkan perundingan dengan Korea Utara dan bukan dengan agresi. Tentu hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Penulis merujuk pada teori pengambilan keputusan luar negeri oleh Richard Synder. Dimana Synder mengatakan bahwa seseorang dalam mengambil keputusan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi seluruh struktur sistem politik, ideologi yang dianut dan juga mengenai tuntutan dari sebagian besar masyarakat dalam suatu negara. Jika jumlah masyarakat di dalam suatu negara berada dalam jumlah yang banyak maka tentunya akan berpengaruh terhadap masalah-masalah yang sedang menjadi perhatian publik ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara tersebut. Pada permasalahan ini, penulis akan menekankan faktor internal pada ideologi. Dalam hal ini ideologi Moon Jae In yang merupakan aktor dalam membuat kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam hubungannya dengan Korea Utara.

Ideologi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Orang-orang mengembangkan ideologi mereka melalui kehidupannya. Tempat kelahiran, bahasa, lingkungan tumbuh dewasa, acara khusus, orang tua, pendidikan, dan banyak orang atau hal lain memengaruhi pembentukan ideologi individu atau kelompok tersebut. Akibatnya, orang membawa set ideologi mereka yang berbeda ke lingkungan hidup dan masyarakat mereka. Ideologi ini mempengaruhi tidak hanya gaya pengambilan keputusan individu dan kelompok tetapi juga proses pengambilan keputusan mereka.

Ideologi yang dianut oleh Moon Jae In adalah ideologi liberal. Ideologi liberal merupakan ideologi yang mempunyai fokus utama pada masalah kebebasan individu. Saat ini, pemerintahan Korea Selatan didominasi oleh partai demokrasi liberal yaitu Partai Demokratik Korea. Partai inilah yang membawa Moon memenangkan pemilihan Presiden. Partai Demokratik Korea mendukung nilai-nilai hak asasi manusia serta mendukung adanya peningatan hubungan dengan Korea Utara. Partai ini biasanya menggunakan cara-cara yang lunak. Denuklirisasi dan perdamaian di kawasan Semenanjung Korea merupakan agenda utama partai ini.

Partai Demokratik Korea dibentuk oleh Kim Dae Jung, yang pada masa kepemimpinannya menggunakan Sunshine Policy. Kemudian dilanjutkan oleh Roh Moon-hyun. Moon sendiri memiliki kedekatan tersendiri dengan Roh. Dimana pada saat Roh menjabat sebagai Presiden, Moon yang menjadi Kepala Sekretaris Kepresidenan.

Moon Jae In adalah seorang pengacara yang menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat mahasiswa, Moon adalah seorang aktivis yang bergabung dengan demonstrasi massa untuk melakukan aksi protes terhadap sikap kediktatoran Park Chung Hee.

Sedangkan faktor eksternal pada umumnya mencakupi faktor-faktor dan kondisi-kondisi atas wilayah territorial suatu negara baik aksi dan reaksi dari negara lain dan masyarakat dengan mana mereka bertindak dalam lingkungan internasional. Faktor eksternal sendiri biasanya berasal dari luar negaranya seperti dari negara lain ataupun dari dunia internasional. Contohnya seperti aliansi internasional, situasi politik internasional, konflik internasional. Dari sudut ini yang harus dipertimbangkan adalah posisi geopolitik negara dalam sistem global serta hubungannya dengan negara lain yang memiliki relevansi.

Korea Utara merupakan negara yang mempunyai relevansi dengan Korea Selatan. Dimana kita telah ketahui bahwa hubungan kedua negara tidak baik hingga tahun 2018. Korea Utara dikenal sebagai negara yang masif dalam melakukan uji coba nuklirnya. Hal ini tentu mengancam stabilitas keamanan Korea Selatan.

Korea Utara tercatat telah melakukan uji coba nuklir sejak tahun 2006. Tentu hal ini menimbulkan kecaman dari dunia internasional. Hingga tahun 2016, Korea Utara tercatat semakin masif dalam melakukan uji coba nuklir. Daya ledak yang diakibatkan oleh uji coba nuklir tersebut semakin tahun juga semakin besar. Korea Utara pada puncaknya dalam melakukan uji coba nuklir pada saat Korea Selatan dipimpin oleh Park Gaeun Hye. Hingga tahun 2017, Korea Utara telah meredam uji coba nuklirnya. Terhitung hanya satu kali Korea Utara melakukan uji coba nuklir tersebut.

Hal ini tentu merupakan langkah yang baik karena membuat Korea Selatan mau untuk memulai pendekatan kembali dengan Korea Utara. Sehingga hal ini dapat membuka kesempatan bagi kedua negara untuk memperbaiki hubungan kembali.